

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada OPD Kota Medan)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Nadia Arofah
NPM : 2105170117
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, pukul 09:00 WIB secara langsung secara virtual, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan memutuskan:

MERUTUSKAN

Nama: NABILLA DWI AGENTHA
NPM: 200170017
Program Studi: AKUNTANSI
Konsentrasi: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir: PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KOTA MEDAN)

Dinyatakan (S) Lulus Pendidikan dan siap melanjutkan pengurusan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Penguji II

NABILLA DWI AGENTHA, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si, AK, CPA

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Anggota



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NADIA AROFAH
N.P.M : 2105170117
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI OPD KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Juni 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., AK., CA.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

oc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nadia Arofah
NPM : 2105170117
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul penelitian : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL
TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Pada OPD Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	Perbaiki tabel dan diagram Rum usang lagi dan lain tabel bepage	19/6 25	3/1
Bab 5	Perbaiki	19/6 25	3/1
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Juni 2025

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nadia Arofah
NPM : 2105170117
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., AK., CA.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi OPD Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	Buang yg tidak perlu	16/25	3/1
Bab 4	Perbaikan Sistem Sman. deskrupsi & data di perkelas. lagi Buang yg tidak perlu.	16/25	3/1
Bab 5	perbaikan laporan	16/25	3/1
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanura, S.E., M.Si.

Medan, Juni 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., AK., CA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nadia Arofah
NPM : 2105170117
Dosen Pembimbing : Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi OPD Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	—		
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	see output ke sidang	25/6/20	3/f

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

Medan, Juni 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., AK., CA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : NADIA AROFAH

N.P.M : 2105170117

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI OPD KOTA
MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



NADIA AROFAH

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA OPD KOTA MEDAN)

**NADIA AROFAH
NPM. 2105170117**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email : nadjaarofah041@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Dinas Kota Medan berjumlah 54 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh berjumlah 54 orang di OPD Dinas Kota Medan. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket/kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan Uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

***Kata Kunci* : Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah.**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PUBLIC SEKTOR ACCOUNTING AND INTERNAL SUPERVISION ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS (STUDY OF OPD IN MEDAN CITY)

NADIA AROFAH
NPM. 2105170117

Facultas Economics and Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : nadiaarofah041@gmail.com

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of the application of public sector accounting and internal control on the performance of government agencies (study on OPD Medan City). The approach used in this study is an associative approach. The population in the study was all OPD of Medan City Service totaling 54. The sample in this study used sensitive sampling totaling 4 people in OPD Denn Kou Medan. Techniques in collecting data in the study of questionnaires. Questionnaires Data Analysis, and Up Hypothesis Processing of data in your research using the PLS (Partial Least Square) software program. The results of this study prove that the implementation of Publik Sector Accounting has an effect on the Performance of Government Agencies. The Implementation of Public Sector Accounting has an effect on the Performance of Government Agencies. The Implementation of Public Accounting and Internal Supervision has an effect on Government Agencies.

Keywords : Impleementation of Public Sector Accounting, Lateral Supervision and Performance of Government Agencies.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallah wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun tugas akhir ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada OPD Kota Medan)”**.

Tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk

Ayahanda **Zahiruddin** terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya yang diberikan kepada penulis.

Ibunda saya yang amat saya cintai yaitu **Ibu Mariany** yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang paling nyaman bagi penulis. Terimakasih selalu menjadi alasan penulis bertahan, terimakasih setiap doa yang ibu panjatkan, setiap pengorbanan yang ibu lakukan, selalu menjadi cahaya yang menerangi langkah penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Senantiasa selalu berusaha berperan sebagai ibu sekaligus ayah dalam hidupku dan selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk anak anaknya. Selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, nasihat, serta doa yang tiada henti hentinya demi tercapai semua cita cita dan keinginan anak anaknya. Terimakasih telah menjadi ibu yang sangat kuat bertahan demi anak anaknya, terimakasih karena tetap menyayangi anak anaknya seburuk apapun itu, terimakasih ibu untuk segala galanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *I Love you more more more.*

Dan kepada cinta kasih kelima saudara kandung tercinta penulis, kepada Abang **Zaharpan, Amsah, Ihsan Ahmad, Rahmatdiansyah, Rohim Sahputra** yang selalu memberikan semangat, dorongan dan memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya secara moril maupun material, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada

adik terakhir kalian ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini mulai dari proses awal sampai proses akhir penyelesaian, penulis telah banyak menerima bantuan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M. A. P.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Dr. H. Januari S.E.,M.M.,M.Si.,CMA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si.** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan dan koreksi kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Bapak **Sukma Lesmana, S.E.,M.Si**, selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membantu dan memberikan arahan kepada penulis.
9. Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik saya selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Sahabat terbaik penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan sampai sekarang ini yaitu **Haliza Fatma Ardyanti** dan **Cut Rahmillah Aceh**. Terimakasih telah menjadi sahabat baik penulis selama masa perkuliahan ini, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis dan terimakasih untuk dukungan serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada kelima adek kos penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu **Nelsa Gustina, Syuhada Maghfiroh, Visca Agustina, Sindy Asyifa, dan Elsi Audina**. Terimakasih buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa, yang selalu menemani dan menghibur penulis dikala lagi sedih dan stress selama menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Kepada teman nusantara penulis sekaligus sahabat yang sangat penulis sayangi yaitu **Naziha Amanda S.Pd, Suci Sesaria S.Ak, Fitri Dara Asmika, dan Iuvnaya Nazhwa Arifa**, terimakasih telah memberikan semangat serta menjadi teman terbaik yang selalu mendengarkan curahan hati penulis dikala senang maupun sedih. Terimakasih buat semua kebaikan kalian kepada penulis dari pertama menginjakkan kaki di ibu kota sampai sekarang ini.
14. My best partner selama dikosan yaitu **Yetti Sumarni**. Yang selalu menjadi teman kulineran ketika pikiran mulai stress, dan terimakasih telah memberikan semangat serta menjadi teman terbaik yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, **Nadia Arofah**. Seorang anak bungsu yang berjalan memasuki usia 22 tahun, sangat keras kepala dan yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak kecil seusianya. Terimakasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidup mu. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu

sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah meridhoi setiap langkahmu serta menjaga mu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa-masa yang akan datang.

Aamiin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2025

NADIA AROFAH
2105170117

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Uraian Teori	14
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	14
2.1.4 Penelitian Terdahulu	25
1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X^1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	30
2.3 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	33
3.2.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1).....	34
3.2.2 Pengawasan Internal (X_2).....	34
3.2.3 Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	35
2.2 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.3.1 Tempat Penelitian.....	37
Tempat penelitian ini dilakukan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas	37
Kota Medan.....	37

3.3.2 Waktu Penelitian	37
Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2025 sampai selesai.....	37
2.3 Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.4.1 Populasi Penelitian	38
3.4.2 Sampel Penelitian.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas	40
3.6.1 Uji Validitas	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.7.1 Analisis Outer Model	46
3.7.2 Analisis Inner Model.....	47
3.7.3 Uji Hipotesis	48
3.7.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural.....	49
3.7.5 Uji Kecocokan (Testing Fit).....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1. Deskripsi Variabel Data	51
4.1.2 Identitas Responden	53
4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian	57
4.1.4 Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	67
4.1.5. Analisis Model Struktural (Inner Model).....	70
4.1.6. Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>)	72
4.1.7. F Square	73
4.2. Pembahasan.....	74
4.2.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	74
4.2.2. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	75
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Tedahulu.....	25
Tabel 1.2 Operasional Variabel Penelitian.....	35
Tabel 1.3 Waktu Penelitian.....	37
Tabel 1.4 Proporsi Sampel Penelitian.....	38
Tabel 1. 5 Skala Ordinal.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 1.2 Model Struktural PLS	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan mekanismen teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014:2). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Perana akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Masalah OPD di kota medan yaitu lemahnya pengawasan internal. Banyak OPD tidak memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Pengawasan hanya bersifat administratif, bukan substantif. Temuan BPK sering menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Adapun dampaknya rentan terjadi penyimpangan, pemborosan anggaran, atau pelaporan yang tidak akurat.

Penerapan akuntansi sektor publik belum maksimal. Beberapa OPD sebelum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) secara benar. Masih banyak terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan

kurang transparan. Adapun dampaknya laporan keuangan tidak akurat, sulit dipercaya, dan kinerja tidak bisa di ukur dengan baik.

Di Indonesia sektor publik menjadi serotan masyarakat umum dimana pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan diharapkan dapat memenuhi harapan dari masyarakat terutama dalam menjalankan pelayanan publik dengan baik. Karlina et al. (2023) menyatakan bahwa perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut.

Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan makna demokrasi yang menyatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Indonesia sedang dalam proses mewujudkan pembangunan daerahnya melalui kinerja terbaiknya (Lubis et al., 2023).

Penilaian kinerja pada setiap organisasi sangat penting dilakukan khususnya di pemerintahan baik sebagai penilaian individu maupun penilaian keseluruhan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan juga sebagai alat ukur penilaian kinerja periode yang lain untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi periode selanjutnya. sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap

terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik (Amran, 2019).

Adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang juga merupakan sebuah kebijakan yang ada di Indonesia yang menyebabkan terbentuknya *Good Governance* sebagai syarat untuk mewujudkan segala aspirasi masyarakat untuk memperoleh tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Jika *Good Governance* diterapkan dengan baik maka kinerja dalam suatu organisasi akan baik sesuai dengan tujuan (Rahmawati, 2022).

Akuntansi Sektor Publik sendiri merupakan sebuah entitas yang berbeda dan unik karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba) (Setiadi, 2021).

Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/ bisnis. Peranan akuntansi sektor

publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta. Karena itu dapat dinyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* dalam rangka pengelolaan dana secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan bisa disebut dengan akuntabilitas publik (Sriwijayanti, 2018). Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Menurut (Haryanto et al., 2013) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang di anggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar

terhadap penilaian kelayakan praktisi manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah pengawasan internal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal menyatakan bahwa pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut (Widyatama et al., 2017).

Pengawasan internal merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan internal dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance dan clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di

lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota untuk kepentingan gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya (Manik & Sari, 2022).

Menurut (Sabeni & Ghozali, 2014) pengawasan intern merupakan suatu alat dari pemimpin organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan kegiatan bawahnya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur sementara mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasar yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2016).

Instruksi presiden no.15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiata-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah (Rizki & Rialdy, 2023).

LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertical yaitu laporan kepada instansi yang di atasnya dan kepala Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan inpres No.7 Tahun 1999 (Sihaloho, F. Laurensius dan Halim, 2010).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Medan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	60	61,89
2	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	Persen	70	41,91
3	Kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persen	3,05	2,66
4	Persentase kawasan permukiman layak huni	Persen	97,9	98,41
5	Indeks reformasi birokrasi	Poin	BB	CC

6	Gini ratio	Indeks	0,32	0,399
7	Indeks pembangunan manusia	Poin	81,62	81,76
8	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,54	4,71
9	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh perda/perwal	Unit	132	93
10	Jumlah kawasan cagar budaya yang di revitalisasi	Kawasan	3	2
11	Indeks pendidikan	Indeks	13,08	11,50
12	Indeks kesehatan	Indeks	74,10	73,58
13	Jumlah gangguan ketertiban umum	Kasus	23,000	20,330
14	Persentase luasan RTH	Persen	12,5	6,73
15	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	BB	B
16	Indeks transformasi data digital	Indeks	0,92	0,83
17	Opini BPK	-	WTP	Dalam proses
18	Nilai sakin	Kategori/Nilai	B	B
19	Pendapatan perkapita	Rp juta	68,50	69,19
20	Pengeluaran perkapita	Rp juta	15,18	15,50
21	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	25,857,56	27,715,97
22	Nilai investasi PMDN	Rp juta	4,550,721,56	3,540,373
23	Nilai investasi PMA	US\$	44,385,00	41,136,00

24	Angka kemiskinan	Persen	7,62	8,07
25	Indeks inovasi daerah	Indeks	62,5	44,04

Sumber : Bappeda Kota Medan

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 25 indikator kinerja yang ditetapkan, beberapa diantaranya telah berada pada kisaran atau mencapai target. Dengan membandingkan antara target dan realisasi diketahui bahwa terdapat 11 indikator yang telah atau sudah mencapai target, antara lain IPM, Indeks kualitas lingkungan hidup, Pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja utama (IKU) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan relative masih rendah yaitu sebesar 44% kondisi tersebut menunjukkan bahwa walaupun telah dicapai beberapa perbaikan, namun masih perlu kerja keras agar capaian atas beberapa indikator lainnya dapat sesuai atau mampu melampaui dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi maka dapat ditemukan fenomena yang terjadi yakni mengenai kinerja instansi pemerintah, bahwa dari anggaran yang telah ditetapkan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021 dan tahun 2023 hampir 90 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan tidak mampu menggunakan sepenuhnya anggaran yang telah disediakan hingga 100 persen, selalu ada sisa dari anggaran tiap tahunnya.

Alasannya yaitu karena banyak faktor lain yang memengaruhi kinerja instansi pemerintah, tidak hanya akuntansi sektor publik dan pengawasan internal, contohnya kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi pegawai, anggaran, dan kebijakan publik. Data dan jawaban responden bersifat subjektif, bisa jadi tidak semua pegawai menjawab secara jujur atau objektif.

Adapun dampaknya jika tidak 100% menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) adalah sebagian, bukan keseluruhan. Misalnya $R^2 = 0,45$ Artinya hanya 45% kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh akuntansi sektor publik dan pengawasan internal. Sisanya 55% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 1.3
Capaian Indikator Kinerja Kota Medan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	B	B	SB
2	Angka Kemiskinan	B	B	C
3	Angka Pengangguran	SB	B	B
4	Pertumbuhan Ekonomi	Kurang	Kurang	Cukup
5	Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)	Cukup	Kurang	Kurang
6	(Pendapatan Perkapita)	C	B	B

Tabel 1.4
Pengukuran Value For Money pada Bappeda Kota Medan

Rasio	2020	2021	2022
Ekonomis	66,1%	67,5%	91,9%
Efisiensi	32,0%	30,6%	22,6%
Efektivitas	84,8%	96,4%	86,7%

Sumber : Data Bappeda

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya pengukuran value for money berdasarkan rasio ekonomis, efektivitas pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Sedangkan efisiensi pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Kaitan antara masalah OPD kota medan dengan value for money. Value for money berarti pengelolaan anggaran publik harus memberikan manfaat maksimal dengan biaya seefisien mungkin, yaitu dengan prinsip :

1. Efisiensi (input yang digunakan seminimal mungkin)
2. Efektivitas (target atau output tercapai)
3. Ekonomi (pengadaan barang dan jasa dengan harga terbaik)

Kaitan dengan penerapan akuntansi sektor publik jika tidak diterapkan dengan benar maka, laporan keuangan tidak akurat, biaya biaya tidak tercatat secara lengkap, evaluasi biaya dan manfaat tidak dapat dilakukan. Ini bertentangan dengan prinsip value for money karena tidak bisa diketahui apakah dana publik digunakan secara efektif dan efisien.

Kaitan dengan pengawasan internal yang lemah menyebabkan pemborosan anggaran tidak terdeteksi, proyek berjalan tanpa efisiensi, tidak ada koreksi jika terjadi penyimpangan

Kaitan dengan kinerja instansi pemerintah OPD dengan kinerja buruk cenderung menghamburkan anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak, tidak mencapai target pelayanan publik, dan tidak efisien dalam operasional.

Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lemah Pada OPD di Kota Medan yang tidak mampu menggunakan anggaran secara keseluruhan.
2. Tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja oleh OPD Kota Medan yang diakibatkan oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan.
3. OPD Kota Medan yang meraih Opini WTP dari BPK akan tetapi anggaran yang disediakan di tiap OPD Kota Medan tidak terealisasi 100%

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan)?
2. Apakah ada pengaruh Pengawasan Internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Dari hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan proposal dan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi, dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya jurusan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.
- b. Dapat menambah teori atau wawasan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Bagi penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih mengetahui dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Bastian (2014:2) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga lembaga tinggi negara dan departemen departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut Halim dan Muhammad (2018:3) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukan.

Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan pada domain publik. Domain publik

antara lain meliputi badan badan pemerintah. Yayasan organisasi publik dan organisasi masa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Publik

Jika dilihat secara garis besar, jenis jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

- a) Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya: (1) Kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain lain; (2) Lembaga dan Badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain lain.
- b) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. Contohnya: (a) Perguruan tinggi BHMN; (b) Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah; dan (c) Yayasan yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

2.1.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018:5).

2.1.1.4 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2014:12) Menjelaskan bahwa elemen elemen akuntansi sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain :

1) Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

2.) Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada

publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dikendalikan melalui anggaran.

3.) Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan dan pengendalian sistematis dari proses proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini. Proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.

4.) Pengendalian Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5.) Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak

yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan,

6.) Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus, mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sektor pemerintahan. Badan usaha milik negara (BUMN), Instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik non pemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

7.) Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

2.1.2 Pengawasan Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan bahwa pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Irjanawadi (2023) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2018:370) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjadikan bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016:133).

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan kegiatan pemerintah mulai dari

program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan Pengawasan Internal

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan dari dalam (Internal Control) dan pengawasan dari luar (Eksternal Control). Pengawasan dari dalam (Internal Control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang terbentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan organisasi.

Menurut Mulyadi dalam Sartika (2019) menyatakan bahwa tujuan pengawasan internal meliputi :

- 1.) Keandalan pelaporan keuangan
- 2.) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 3.) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Dari definisi definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dalam suatu lembaga pendidikan merupakan fungsi staf yang melakukan penilaian secara bebas atau tidak memihak dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan

mengevaluasi seluruh aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya tersebut kepada manajemen sebagai suatu jasa pelayanan, dan bertanggungjawab penuh kepada manajemen.

2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.4 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau hasil kerja secara kualitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2015:67).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Prawirosentono (2008:2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Mulyadi (2015:63) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno

(2015:151) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

2.1.3.2 Manfaat Kinerja Instansi Pemerintah

Manfaat Mardiasmo (2009:7) bahwa manfaat pengukuran kinerja instansi pemerintah antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang memberikan telah disepakati
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

2.1.3.3 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Biduri (2018:139) menyatakan bahwa indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Mardiasmo dikutip (Biduri, 2018:139) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

2.1.3.4 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Haryanto, dkk (2017:8) menyatakan bahwa salah satu tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan konsep value for money dalam aktivitas organisasi sektor publik. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu

ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini adalah merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskannya. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu sehingga hasil penelitian ini dapat melaporkan teori yang baru dan wawasan kajian teoritis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti tentang Penerapan Akuntansi dan Pengawasan Internal apakah berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di antaranya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yang mana berbeda dengan peneliti terdahulu yang menggunakan 2 atau lebih variabel.

Adapun ringkasan yang dapat dilihat pada tabel di bawah mengenai kesimpulan peneliti terdahulu, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Tedahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Muhammad Alfen Tadjudinsyah & Fitria	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Terdapat pengaruh yang signifikan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Koefisien yang dihasilkan positif. Artinya bahwa apabila semakin baik akuntansi sektor publik maka cenderung meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah.
Fitriani Saragih (2014)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD SE Kota Medan.	Good Governance Government has no significant influence on financial performance SKPD in Medan The influence of good government governance to financial performance SKPD in Medan is very low.
Bella Familia Irene (2024)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening	Terdapat Pengaruh Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance pada instansi pemerintah daerah, Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance pada instansi pemerintah daerah, Good Governance berpengaruh positif dan

		signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.
Amelia Amran, (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo	Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo, sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.
Astria Fitria (2023)	Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik. Pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.	Terdapat pengaruh yang signifikan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.
Agnestasia Laura (2016)	Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi	Terdapat pengaruh yang signifikan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

		<p>Terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di kabupaten minahasa selatan, Ketaatan Peraturan Perundangan secara Parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja yang ada di kabupaten minahasa selatan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan ketaatan peraturan perundangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di kabupaten Minahasa Selatan.</p>
<p>Ryan Aji Mahendra (2023)</p>	<p>Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi di kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar).</p>	<p>Pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik terhadap kinerja pemerintah, Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.</p>
<p>Fitria Aulia Mubarokah (2023)</p>	<p>Pengaruh ketetapan sasaran, partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>Pengaruh ketetapan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja</p>

		instansi pemerintah desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
Dewiyanti (2017)	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, ketetapan sasaran anggaran, dan pengendalian intern pada kinerja instansi pemerintah.	Penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Ketetapan sasaran anggaran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
Dewi Karno (2018)	Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah(Studi pada pemerintah kota surabaya).	Penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
Risky Handayani (2024)	Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.	Ketetapan sasaran anggaran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari teori yang hasilnya semua berpengaruh dan didukung oleh peneliti terdahulu, maka disimpulkan kerangka berfikir konseptual sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X^1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntansi Sektor Publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan publik yang di anggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto et al., 2017:1). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahima, Amrul 2010 menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Pengaruh Pengawasan Internal (X^2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau

unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan internal kontrol (Purba, 2018).

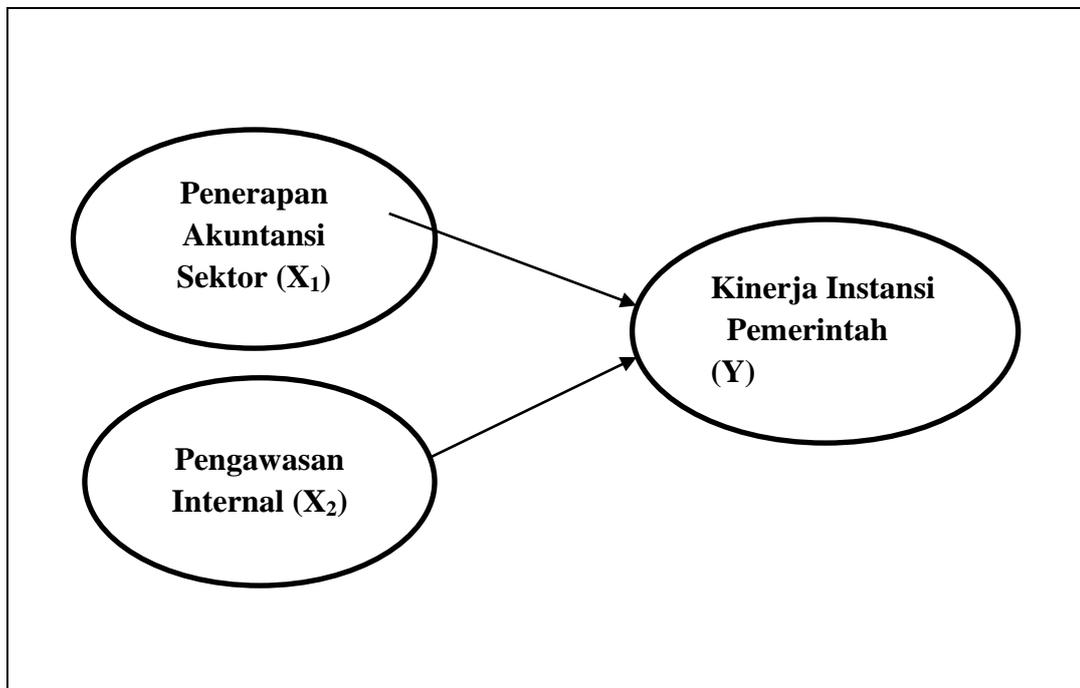
3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal

(X) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian di audit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas, di duga bahwa peranan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Manfaat utama yang diperoleh dari pengawasan intern yaitu membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang dapat dipercaya, dan dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya.

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan dari teori di atas yang hasilnya semua berpengaruh, maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan)
2. Terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan)
3. Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada OPD Kota Medan).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapatan, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologi dari sampel yang di ambil dari populasi tertentu (Sugiyono, 2020, hal. 57). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan assosiatif. Penelitian assosiatif adalah suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2022, hal. 65)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh antara kedua variabel tersebut maka penulis menggunakan metode assosiatif. Jadi disini terdapat variabel yang mempengaruhi (*Variabel dependen*) dan variabel yang dipengaruhi (*variabel independen*) (Sugiyono, 2016)

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Diuraikan definisi dari kedua variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel

independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab, karena adanya variabel yang dipengaruhi.

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel Dependen yakni Kinerja Instansi Pemerintah sebagai (Y) dan Variabel Independen, yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik sebagai (X_1) dan Pengawasan Internal sebagai (X_2).

3.2.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1)

Suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan stndaryang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah bekerja sesuai standar yang berlaku Menurut Bastian (2014:) siklus akuntansi keuangan sektor publik bisa diukur dengan :

1. Transaksi, persetujuan jual beli
2. Analisis bukti transaksi
3. Pencatatan data transaksi
4. Pengikhtisaran, dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok
5. Pelaporan, selama satu periode akuntansi.

3.2.2 Pengawasan Internal (X_2)

Pengawasan Internal adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan selektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintah menurut Swayer's (2005 : 49) menyebutkan beberapa indikator yang dapat digunakan manager untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan adalah :

1. Organisasi (Organization)
2. Kebijakan (Policy)
3. Prosedur (Procedure)
4. Personalia (Personnel)
5. Akuntansi (Accounting)
6. Penganggaran (Budgeting)
7. Pelaporan, kebanyakan organisasi.

3.2.3 Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Peraturan presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tabel 1.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Kinerja Instansi Pemerintah (Y)</i>	Menurut (Mattoasi et al., 2021) Kinerja Instansi Pemerintah yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas 	Ordinal

	dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya.		
<i>Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X₁)</i>	Menurut (Bastian, 2014) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Publik 2. Penganggaran Publik 3. Realisasi Anggaran Publik 4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik 5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik 6. Audit Sektor Publik Pertanggung Jawaban Publik. 	Ordinal

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kota Medan yang berjumlah 54 Dinas.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017) bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini untuk teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (total sampling), dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan Berjumlah 18 Dinas.

Tabel 1.4 Proporsi Sampel Penelitian

No	Nama Organisasi Pemerintahan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan
2	Dinas Kesehatan Kota Medan
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bima Kontruksi Kota Medan
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan
5	Dinas Sosial Kota Medan
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Medan
7	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan

9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan
12	Dinas Perhubungan Kota Medan
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan
16	Dinas Pemuda Olahraga Kota Medan
17	Dinas Parawisata Kota Medan
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Daftar Pertanyaan (Questioner)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kota Medan.

Angket/ kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam peneliti ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Skala Pengukuran

No	Notasi	Pertanyaan	Bobot
1	Sangat Baik	Sangat Memadai	5
2	Baik	Memadai	4
3	Kurang Baik	Kurang Memadai	3
4	Tidak Baik	Tidak Memadai	2
5	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Memadai	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

Untuk menguji apakah instrumen yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas :

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuran pun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018). Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : (Sugiyono, 2019)

Dimana :

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$ = Jumlah pengamatan variabel x

$\sum y$ = Jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable x

$(\sum y^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali variable x dan y

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar

hasil pengukuran pun kemungkinan akan benar (Juliandi et al.,2018).

Tabel 3.5 Uji Validitas

Item Pernyataan		r hitung	r tabel	Keterangan
Kinerja Instansi Pemerintah	Y1	0,594	0,2681	Valid
	Y2	0,606	0,2681	Valid
	Y3	0,445	0,2681	Valid
	Y4	0,591	0,2681	Valid
	Y5	0,649	0,2681	Valid
	Y6	0,636	0,2681	Valid
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	X1.1	0,761	0,2681	Valid
	X1.2	0,702	0,2681	Valid
	X1.3	0,639	0,2681	Valid
	X1.4	0,699	0,2681	Valid
	X1.5	0,613	0,2681	Valid
	X1.6	0, 588	0,2681	Valid
Pengawasan Internal	X2.1	0,648	0,2681	Valid
	X2.2	0,542	0,2681	Valid
	X2.3	0,719	0,2681	Valid
	X2.4	0,845	0,2681	Valid
	X2.5	0,718	0,2681	Valid
	X2.6	0,748	0,2681	Valid

1. Nilai validitas untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,2681 maka semua indikator pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik lebih besar dari nilai r yakni 0,2681 maka semua indikator pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik dinyatakan valid.
3. Nilai validitas untuk variabel Pengawasan Internal lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,2681 maka semua indikator pada variabel Pengawasan Internal dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya)
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Status
1	Kinerja Instansi Pemerintah	0,758	Reliabilitas Baik
2	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0,758	Reliabilitas Baik
3	Pengawasan Internal	0,758	Reliabilitas Baik

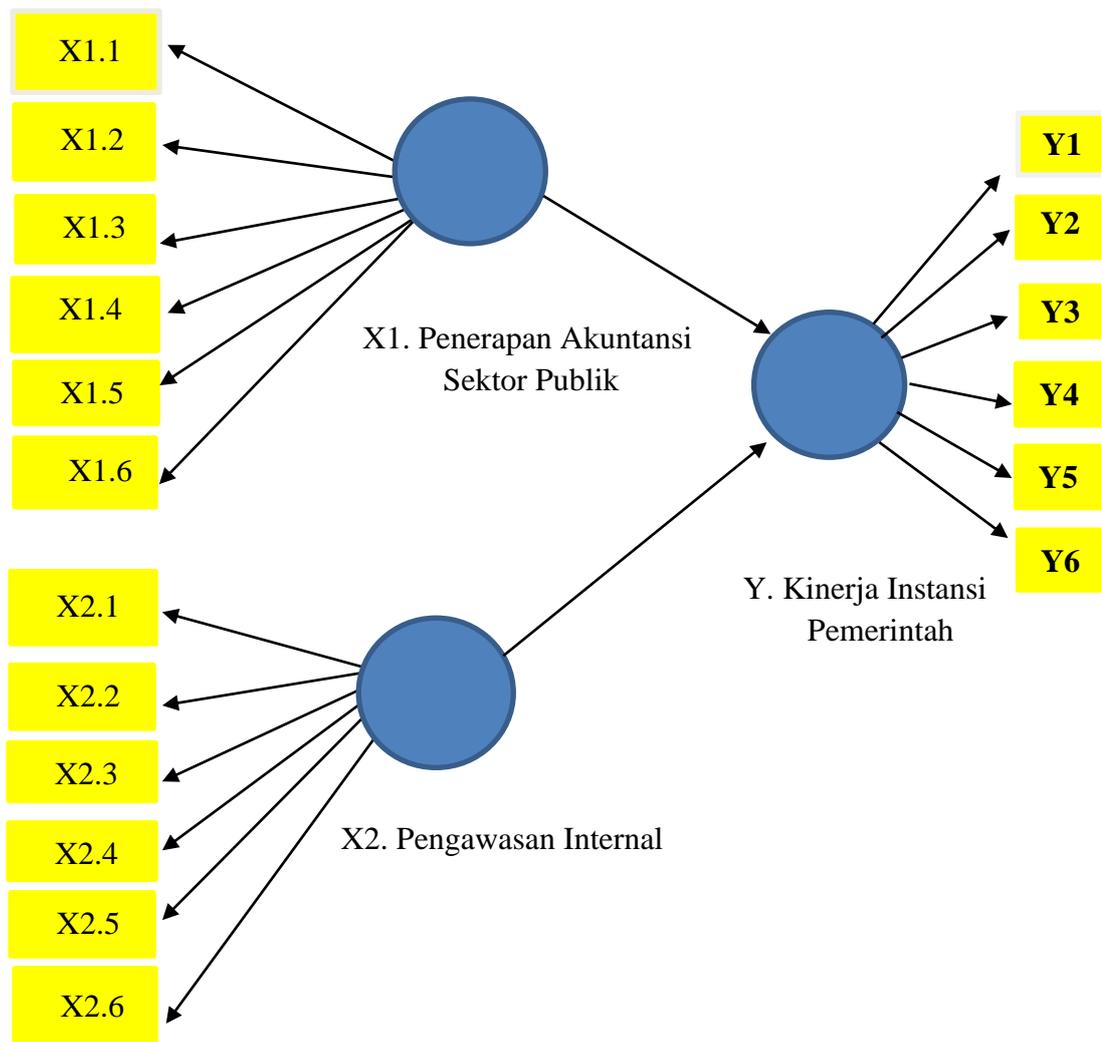
1. Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,758 > 0,600$
Maka variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah reliabel
2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,758 > 0,600$ maka variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah reliabel
3. Pengawasan Internal memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,758 > 0,600$ maka variabel Pengawasan Internal adalah reliabel.

3.7 Teknik Analisis Data

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni partial least square – structural equation model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latan 2015). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Tujuan dari penggunaan (Partial Least Square) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten di dapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.



Gambar 1.2 Model Struktural PLS

Menurut Musli and Pratama (2022) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu

1. Analisis model pengukuran (Outer Model), yakni
 - a. Validitas konvergen (Convergent Validitas) ;
 - b. Realibilitas dan validitas konstruk (Construct Realibilitas And Validity);
 - c. Validitas diskriminan (Discriminant Validiry).
2. Analisis model struktural (Inner Model), yakni
 - a. Koefisien determinasi (R-Square);

- b. F-square; dan
- c. Pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang di dapat dengan (Partial Least Square) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut : kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (Path Estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (Loading). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

- a. menghasilkan weight estimate
- b. menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model
- c. menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

3.7.1 Analisis Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator :

1. Convergent Validity

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading faktor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin di ukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

2. Discriminant Validity

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai Squarerot Of Average Variance Extracted (AVE).

3. Composite Reliability

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada View Latent Coefficient. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan Cronbach's Alpha. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

4. Cronbach's Alpha

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

3.7.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (Inner Relation, Structural Model Dan Substantive Theory) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model

dapat di evaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Stone – Geisser Q – square test untuk predictive dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (Partial Least Square) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (Partial Least Square) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q- square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3.7.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$.

3.7.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

3.7.5 Uji Kecocokan (Testing Fit)

Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model di uji dengan melihat nilai R-square, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikan untuk menguji nilai signifikan hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali & Latan, 2015).

1. R-Square Test

Nilai R-square atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman konstruk-konstruk eksogen yang mampu menjelaskan konstruk endogen secara serentak. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini juga digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 10. Semakin tinggi nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square (r^2) digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel laten dependen secara substantive (Ghozali & Latan, 2015).

2. Path Coefficient Test

Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01. Serta hubungan antar variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Khususnya dinas dinas yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan jasa di wilayah Sumatera Utara. Dengan status sebagai kota metropolitan, kota Medan memiliki struktur pemerintahan daerah yang kompleks dan didukung oleh berbagai OPD, termasuk dinas dinas teknis yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas sebagai bagian dari OPD berfungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Medan, terdapat sejumlah dinas yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik, seperti :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan
2. Dinas Kesehatan Kota Medan
3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bima Kontruksi Kota Medan
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan
5. Dinas Sosial Kota Medan

6. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Medan
7. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan
12. Dinas Perhubungan Kota Medan
13. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan
14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
15. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan
16. Dinas Pemuda Olahraga Kota Medan
17. Dinas Parawisata Kota Medan
18. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan

Dinas dinas ini memiliki tugas, fungsi, dan program kerja yang berbeda beda sesuai bidangnya, namun semuanya memiliki kesamaan dalam hal tanggung jawab pengelolaan anggaran, penerapan sistem akuntansi sektor publik, serta pelaksanaan pengawasan internal.

Sebagian besar kantor dinas di kota medan berlokasi di pusat pemerintahan kota dan tersebar di berbagai wilayah administratif. Kantor kantor dinas ini menjadi lokasi penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan daerah, serta menjadi objek penelitian yang relevan untuk

mengevaluasi sejauh mana penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

4.1.2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang menjadi objek penelitian. Kuesioner disebarkan secara langsung maupun melalui media daring kepada responden yang telah ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Adapun tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada gambar :

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase	%
1	Kuesioner yang disebarkan	18	54	100%
2	Kuesioner yang kembali	18	54	100%

Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada responden yang merupakan pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 54 dan seluruhnya berhasil dikembalikan serta dapat diolah. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam penelitian ini sangat baik, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang representatif dari populasi yang diteliti.

4.1.3. Demografi Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Kota Medan. Maka diperoleh 54 orang responden yang mengisi kuesioner melalui penyebaran angket, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Pengelompokan data sampel tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas Kota Medan. Adapun demografi responden sebagai berikut :

4.1.3.1 Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	34	31,48%
2	Perempuan	20	18,52%
TOTAL		54	50,00%

Sumber : Data Diolah 2025

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 34 (31,48%) orang laki laki dan perempuan sebanyak 20 (18,52%) orang. Bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki laki pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kota Medan.

4.1.3.2 Identitas Berdasarkan Umur

Tabel 4.3
Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 - 30 Tahun	15	13,89%
2	31 - 40 Tahun	25	23,15%
3	41 - 50 Tahun	14	12,96%
4	51 - 60 Tahun	0	0,00%
TOTAL		54	50,00%

Sumber : Data Diolah 2025

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa responden terdiri dari karyawan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 15 Orang (13,89%), berumur 31-40 tahun sebanyak 25 orang (23,15%), dan berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 14 orang (12,96%). Dengan demikian yaitu menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu 31 sampai 40 tahun pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kota Medan.

4.1.3.3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4
Tingkatan Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D3	4	3,70%
2	S1	40	37,04%

3	S2	10	9,26%
4	S3	0	0,00%
TOTAL		54	50,00%

Sumber : Data Diolah 2025

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa responden terdiri dari karyawan yang berlatar pendidikan D3 sebanyak 4 orang (3,70%), pendidikan S1 sebanyak 40 orang (37,04%), dan pendidikan Strata-2 yaitu sebanyak 10 orang (9,26%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berlatar belakang pendidikan Strata-1 pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kota Medan.

4.1.3.4 Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.5
Lama Bekerja Responden

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	< 10 Tahun	40	37,04%
2	11-20 Tahun	14	12,96%
3	>20 Tahun	0	0,00%
TOTAL		54	50,00%

Sumber : Data Diolah 2025

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa responden terdiri dari karyawan yang lama bekerja < 10 tahun sebanyak 40 orang (37,04%), dan lama bekerja 11-20 tahun sebanyak 14 orang (12,96%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu kurang dari 10 tahun pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kota Medan).

4.1.4. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri 3 variabel yaitu Kinerja Instansi Pemerintah (Y), Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X^1) dan Pengawasan Internal (X^2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2019) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga Interval kategorinya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6

Pedoman Interval kategorinya yaitu sebagai berikut :

Interval Kuesioner	Kategori	
1,00 – 1,80	Sangat Tidak baik	Sangat Tidak Memadai
1,81 – 2,60	Tidak Baik	Tidak Memadai
2,61 – 3,40	Kurang Baik	Kurang Memadai
3,41 – 4,20	Baik	Memadai
4,21 – 5,00	Sangat Baik	Sangat Memadai

Setelah diperoleh kategorisasi rata rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas anggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

4.1.3.1 Deskripsi Variabel Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan diperoleh nilai nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

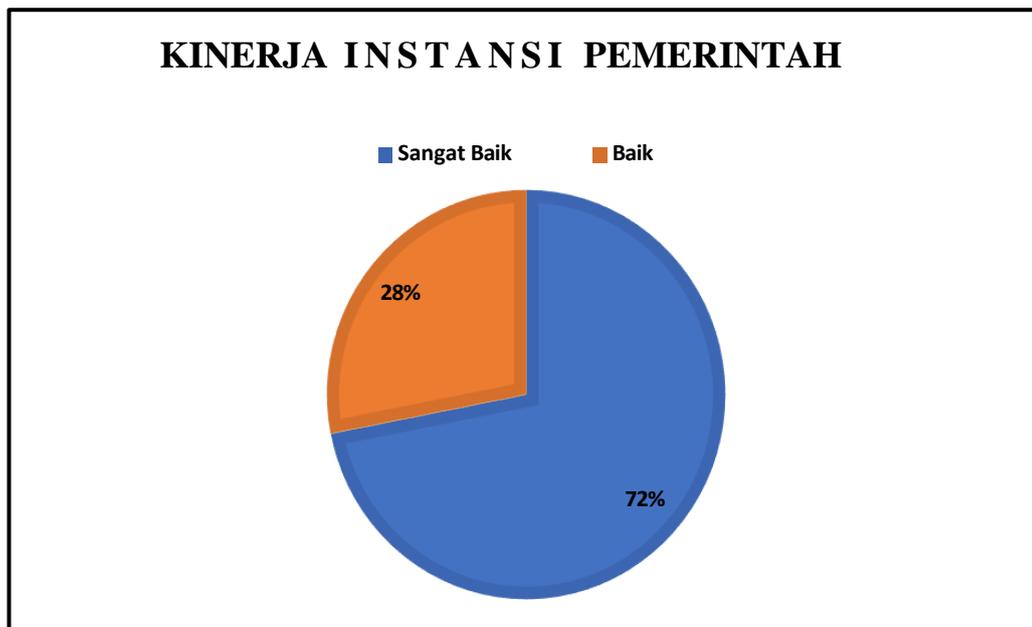
No	Pernyataan		SB	B	KB	TB	ST B	Total Skor	Rata Rata Skor	Kategori
1	Penetapan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan kinerja instansi pemerintah	F	17	36	1	0	0	54		Sangat Baik
		%	31,45	66,67	1,86	0	0	100		
		Skor	85	144	3	0	0	232	4,30	
2	Analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan	F	21	31	2	0	0	54		Sangat Baik
		%	38,89	57,41	3,71	0	0	100		
		Skor	105	124	6	0	0	235	4,36	
3	Pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan	F	18	33	3	0	0	54		Sangat Baik
		%	33,34	61,12	5,56	0	0	100		
		Skor	90	132	9	0	0	231	4,28	

4	Pengecekan terhadap jalannya program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	F	12	37	4	1	0	54	Baik
		%	22,23	68,52	7,41	1,86	0	100	
		Skor	60	148	12	2	0	222	
5	Penggunaan LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program atau kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.	F	14	38	2	0	0	54	Sangat Baik
		%	25,93	70,38	3,71	0	0	100	
		Skor	70	152	6	0	0	228	
6	Keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.	F	16	37	1	0	0	54	Sangat Baik
		%	29,63	68,52	1,86	0	0	100	
		Skor	80	148	3	0	0	231	
Total Rata Rata Skor									4,74

Sumber : Data Primer (2025)

Berdasarkan tabel 4,7 diatas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden mengenai pernyataan dari variabel Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu responden lebih dominan memilih kelompok jawaban baik, pada item pernyataan “Analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan”. Sebanyak 31 dengan persentase rata rata skor sebesar 57,41 %. Hal ini

menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dinas Kota Medan sudah menerapkan indikator Kinerja Instansi pemerintah dengan baik. Kinerja Instansi Pemerintah memiliki rata rata skor jawaban responden sebesar 4,74.



Adapun data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :

Gambar 4.1 Diagram Kinerja Instansi Pemerintah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya tanggapan responden pada item pernyataan di variabel Kinerja Pemerintah Pemerintah berada dalam kategori sangat baik dengan jumlah persentase sebanyak 72%.

4.1.3.2. Deskripsi Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan diperoleh nilai nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut :

Tabel 4.8

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X¹)

No	Pernyataan		SB	B	KB	TB	STB	Total Skor	Rata Rata Skor	Kategori
1	Laporan keuangan yang telah mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap aset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu.	F	14	40	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	25,93	74,75	0	0	0	100		
		Skor	70	160	0	0	0	230	4,26	
2	Laporan keuangan sebagai media pertanggung jawaban	F	16	38	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	29,63	70,38	0	0	0	100		
		Skor	80	152	0	0	0	232	4,30	
3	Bagaimana laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat di perbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan	F	21	33	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	38,89	61,12	0	0	0	100		
		Skor	105	132	0	0	0	237	4,39	

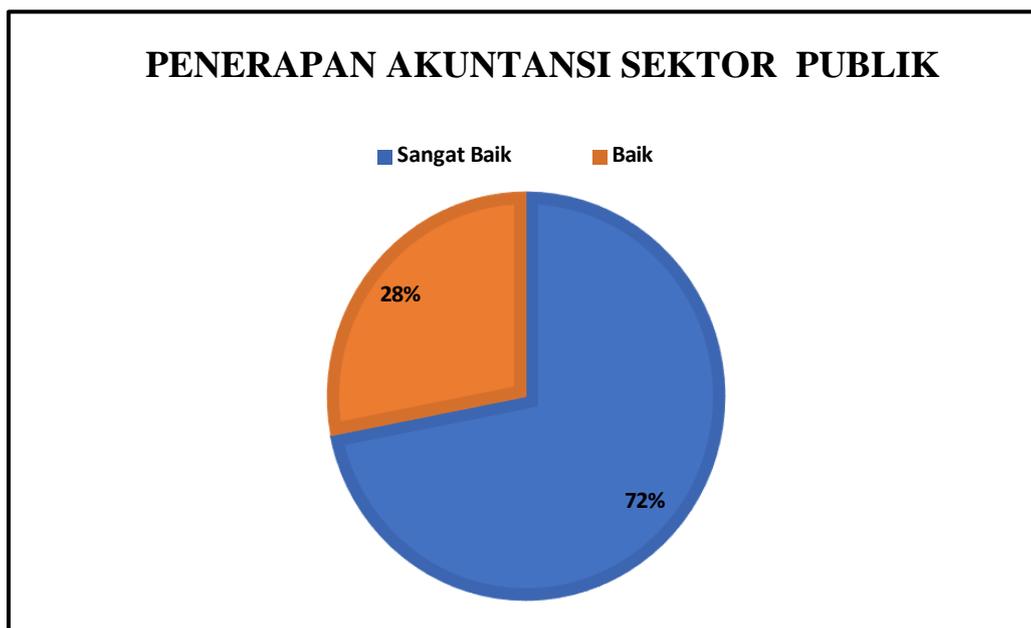
4	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur unsur laporan keuangan.	F	17	37	0	0	0	54		Sangat Baik	
		%	31,49	68,51	0	0	0	100			
		Skor	85	148	0	0	0	233	4,32		
5	Informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan	F	11	43	0	0	0	54		Sangat Baik	
		%	20,38	79,63	0	0	0	100			
		Skor	55	172	0	0	0	227	4,21		

6	Laporan keuangan sebagai media pertanggung jawaban	F	26	28	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	48,15	51,86	0	0	0	100		
		Skor	130	112	0	0	0	242	4,49	
Total Rata Rata Skor									4,81	

Sumber : Data Primer (2025)

Berdasarkan tabel 4,8 diatas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden mengenai pernyataan dari variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, yaitu responden lebih dominan memilih kelompok jawaban baik, pada item pernyataan “Laporan keuangan sebagai media pertanggung jawaban”. Sebanyak 28 dengan persentase rata rata skor sebesar 51,86%. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dinas Kota Medan sudah menerapkan indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan baik. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki rata rata skor jawaban responden sebesar 4,81.

Adapun data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :



Gambar 4.2 Diagram Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya tanggapan responden pada item pernyataan di variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik berada dalam kategori sangat baik dengan jumlah persentase sebanyak 72%.

4.1.3.3. Deskripsi Variabel Pengawasan Internal

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan diperoleh nilai nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pengawasan Internal sebagai berikut :

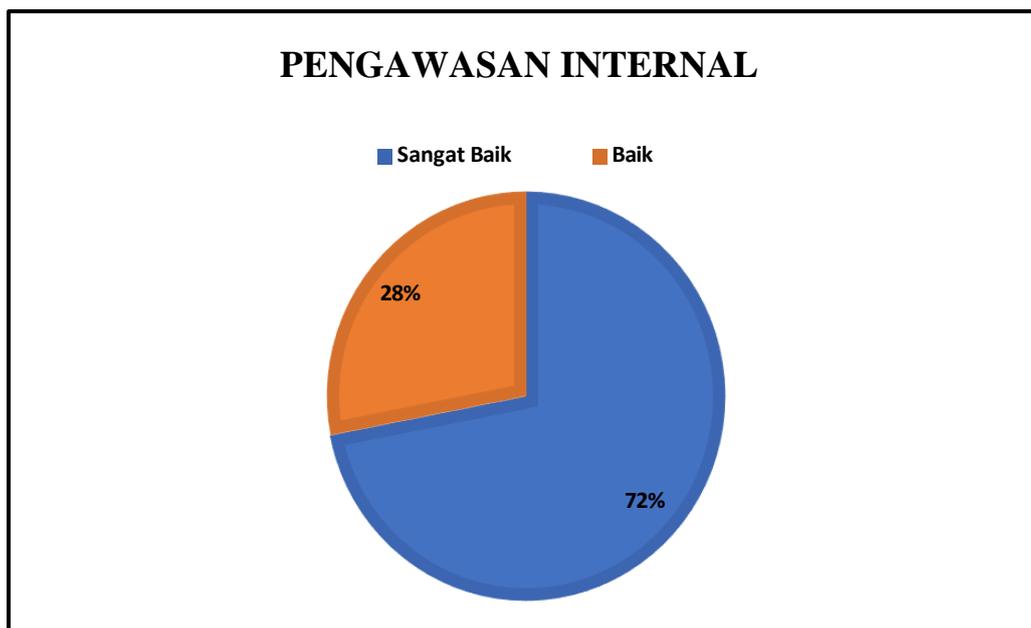
Tabel 4.9
Variabel Pengawasan Internal (X²)

No	Pernyataan		SB	B	KB	TB	STB	Total Skor	Rata Rata Skor	Kategori
1	Standar operasional prosedur yang dibuat untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran	F	11	43	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	20,38	79,63	0	0	0	100		
		Skor	55	172	0	0	0	227	4,21	
2	Pemisahan wewenang yang dilakukan antara kegiatan dan transaksi	F	10	44	0	0	0	54		Baik
		%	18,52	81,49	0	0	0	100		
		Skor	50	176	0	0	0	226	4,19	
3	Bukti transaksi yang valid dan sah untuk mendukung setiap transaksi	F	13	41	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	24,75	75,93	0	0	0	100		
		Skor	65	164	0	0	0	229	4,25	
4	Tindakan disiplin yang tepat apabila terjadi penyimpangan terhadap kebijakan dan	F	10	44	0	0	0	54		Baik
		%	18,52	81,49	0	0	0	100		

	prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku	Skor	50	176	0	0	0	226	4,19	
5	Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses	F	14	40	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	25,93	74,75	0	0	0	100		
		Skor	70	160	0	0	0	230	4,26	
6	Pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terbentuknya operasi computer.	F	12	42	0	0	0	54		Sangat Baik
		%	22,23	77,78	0	0	0	100		
		Skor	60	168	0	0	0	228	4,23	
Total Rata Rata Skor									4,70	

Sumber : Data Primer (2025)

Berdasarkan tabel 4,9 diatas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden mengenai pernyataan dari variabel Pengawasan Internal, yaitu responden lebih dominan memilih kelompok jawaban baik, pada item pernyataan “Bukti transaksi yang valid dan sah untuk mendukung setiap transaksi”. Sebanyak 41 dengan persentase rata rata skor sebesar 75,93%. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dinas Kota Medan sudah menerapkan indikator Pengawasan Internal dengan sangat baik. Pengawasan Internal memiliki rata rata skor jawaban responden sebesar 4,70.



Adapun data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut :

Gambar 4.3 Diagram Pengawasan Internal

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya tanggapan responden pada item pernyataan di variabel Pengawasan Internal berada dalam kategori sangat baik dengan jumlah persentase sebanyak 72%.

4.1.5 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.1.5.1 Validitas Konvergen

Validitas Konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternative dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loadingnya*. Jika nilai *outer loading* lebih besar dari (0,4) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.9
Validitas Konvergen

	X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik	X2. Pengawasan Internal	Y. Kinerja Instansi Pemerintah
X1.1	0,818		
X1.2	0,716		
X1.3	0,713		
X1.4	0,732		
X1.5	0,722		
X1.6	0,846		
X2.1		0,816	
X2.2		0,764	
X2.3		0,741	
X2.4		0,866	
X2.5		0,735	
X2.6		0,740	
Y1			0,863
Y2			0,856
Y3			0,828
Y4			0,875
Y5			0,833
Y6			0,815

Sumber : SEM PLS (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai outer loading untuk variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik dinyatakan valid.
2. Nilai outer loading untuk variabel Pengawasan Internal lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Pengawasan Internal dinyatakan valid.
3. Nilai outer loading untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan valid.

4.1.5.2. Analisis Konsistensi Internal

Analisis Konsistensi Internal adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas komposit $> 0,600$ (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.10
Analisis Konsistensi Internal

	Cronbach 's Alpha	Rho-A	Reliabilitas Komposit	Rata Rata Varians Diekstrak (AVE)
X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0,863	0,872	0,891	0,845
X2. Pengawasan Internal	0,921	0,940	0,938	0,714
Y. Kinerja Instansi Pemerintah	0,870	0,883	0,902	0,606

Sumber : SEM PLS (2025)

Berdasarkan data analisis konsistensi internal pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel :

1. Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,891 > 0,600$ maka variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik adalah reliabel.
2. Pengawasan Internal memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar $0,940 > 0,600$ maka variabel Pengawasan Internal adalah reliabel
3. Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,902 > 0,600$ maka variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah reliabel.

4.1.6. Analisis Model Struktural (Inner Model)

Dalam pengujian ini terdapat dua tahapan, yakni pengujian hipotesis pengaruh langsung dan pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung. Adapun koefisien-koefisien jalur pengujian hipotesis terdapat pada gambar di bawah ini :

4.1.6.1 Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) Bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. (Hair Jr et al., 2017).

1. Nilai R Square sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat
2. R Square sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang.
3. Nilai R Square sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4.14

R Square

	R Square	Adjusted R Square
Pengawasan Internal	0,162	0,129

Sumber : SEM PLS (2025)

Pada tabel diatas diperoleh hasil pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,162 artinya besaran pengaruh 16,2 %, hal ini berarti menunjukkan PLS yang kuat.

4.1.6.2 F Square

Pengukuran F-Square atau F^2 effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran F^2 (f-square) disebut juga efek perubahan R^2 . Artinya, perubahan nilai R^2 . Artinya, perubahan nilai R^2 saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan

untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Ghozali & Latan, 2015).

Kriteria F- Square menurut (Ghozali & Latan, 2015) adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai $F^2 = 0,02$ -> Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Jika nilai $F^2 = 0,15$ -> Efek yang sedang/ moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan
3. Jika nilai $F^2 = 0,35$ -> Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4.15

F Square

	X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik	X2. Pengawasan Internal	Y. Kinerja Instansi Pemerintah
X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0,019		
X2. Pengawasan Internal		0,053	
Y. Kinerja Instansi Pemerintah			

Sumber : SEM PLS (2025)

Kesimpulan nilai F-Square dapat dilihat pada tabel 4.12 adalah sebagai berikut: Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai $F^2 = 0,049$, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai $F^2 = 0,053$ maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.

4.1.7 Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara) yakni :

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.
2. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya (Hair Jr et al., 2017)

Dan untuk nilai Probabilitas nya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) < Alpha (0,05) maka Ho ditolak
(Pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan)
2. Jika nilai probabilitas (P-Value) > Alpha (0,05) maka Ho diterima
(Pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)

Tabel 4.13

Hipotesis Pengaruh Langsung

	Sampel Asli (O)	Rata Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
X1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik -> Y.Kinerja Instansi Pemerintah	0,163	0,226	0,216	0,758	0,449
X2. Pengawasan Internal -> Y. Kinerja Instansi	0,277	0,278	0,198	1.400	0,162

Pemerintah					
-------------------	--	--	--	--	--

Sumber : SEM PLS (2025)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh :

1. Pengaruh langsung Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar 0,163 (positif), dan memiliki nilai P-Values sebesar 0,449 maka $0,449 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Pengaruh langsung Pengawasan Internal terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai koefisien jalur sebesar 0,277 (Positif), dan memiliki nilai P-Values sebesar 0,162 maka $0,162 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1.8 Pembahasan

4.1.8.1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin baik sistem Akuntansi Sektor Publik diterapkan dalam suatu OPD, maka kinerjanya juga akan meningkat. Koefisien jalur dari variabel ini menunjukkan adanya hubungan langsung, meskipun efek besarnya tergolong kecil berdasarkan nilai F-Square sebesar 0,049. Artinya, semakin baik instansi menerapkan prinsip prinsip akuntansi sektor

publik, seperti penyajian laporan keuangan yang transparan, relevan, dan dapat dipercaya, maka kinerja instansi pemerintah akan semakin baik pula. Hal ini sejalan dengan teori Bastian (2014) yang menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik berperan penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Temuan ini memperkuat pendapat Bastian (2014) yang menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik berfungsi sebagai alat pengelolaan dan pertanggung jawaban publik yang membantu mencapai tujuan organisasi pemerintah. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tadjudinsyah & Fitria (2023), serta Bella Familia Irene (2024), yang menyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik secara signifikan mampu meningkatkan good governance dan kinerja instansi pemerintah.

4.1.8.2. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai F- Square sebesar 0,053 menunjukkan bahwa pengaruhnya tergolong kecil, namun tetap signifikan. Pengawasan Internal yang efektif seperti Penerapan Standar Operasional Prosedur, pemisahan wewenang, dan validitas transaksi berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Pengawasan Internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan Internal ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan

oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Sanjaya et al., 2021).

Kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan seseorang. Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan pertanggung jawaban nya dengan hasil seperti yang diharapkan (Alpi,2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok et al.,2021), (Jatmiko,2020), (Tadjudinsyah & Fitria, 2023) dan (Rahayu & Yudi, 2021), menyebutkan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip prinsip akuntansi sektor publik, maka kinerja instansi pemerintah juga semakin meningkat.
2. Pengawasan Internal juga berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Pengawasan Internal. Dengan arah pengaruh positif yang efektif mampu mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan jika Pengawasan Internal memadai maka Kinerja Instansi Pemerintah juga akan meningkat.
3. Secara simultan, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Kombinasi dari dua faktor ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada OPD khususnya Dinas Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dinas kota medan untuk terus meningkatkan kualitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan memperkuat sistem Pengawasan Internal agar Kinerja Instansi Pemerintah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang relevan serta memperluas cakupan penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.
3. Bagi instansi OPD khususnya Dinas Kota Medan, penting untuk terus melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai Akuntansi Sektor Publik dan mekanisme Pengawasan Internal kepada seluruh pegawai, agar kesadaran dan pemahaman mereka semakin meningkat.
4. Bagi pihak akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan kurikulum dan diskusi ilmiah, khususnya pada mata kuliah konsentrasi Sektor Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang.
- Alpi, M. F. (2019, October). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 355-364).
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanum, A., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi...*,1, 811-816.
- Eka Nurmala Sari, Fitriani Saragih 2009, Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Hotel Berbintang di Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Fitriani Saragih, SE, M. Si, 2014, Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD SE Kota Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hafsah, Ramdhansyah, Hasan Sakti Siregar, 2014, Analisis Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Sari, E. N. & Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5 (2), 107-126.
- Sinambela, E. & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Ramadayanti, Saragih, 2021, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Amran, A. (2020). Pengaruh pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah: pada badan perencanaan

- pembangunan daerah (bappeda) kota palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1).
- Arsi, A., & Herianto, H. (2021). Langkah-langkah Uji Validitas Dan Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan SPSS.
- Dewiyanti, S. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di Pemerintah Kabupaten Batanghari. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 2(1), 47-58.
- Edowai, R., Abubakar, H., & Mane, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Deiyai Provinsi Papua. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 121–127.
- Elisabeth, D. M. (2019). Analisis fungsi dan tujuan internal auditor dalam pelaksanaan pengendalian intern untuk memaksimalkan kinerja perusahaan: Studi kasus pada salah satu BUMN di Kota Medan. *Methodika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 2(2), 131-140.
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Inter dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ Vol.1 No.2*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program smart PLS 3.0 (2nd ed.). Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. (2018). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. (2016). Manajemen. Yogyakarta : BPF
- Handayani, R., Yulitiawati, Y., Dona, E. M., & Aini, H. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Oku. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 10(1), 28-42.
- Harun, M. I. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(1), 91-109.

- Haryanto., Sahmuddin., dan Arifuddin. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2017). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Indra Bastian. (2014). Akuntansi Sektor Publik. In: *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Irjanawadi, L., Zaki, M., Al Idrus, S. A. J., & Nasri, U. (2023). Manajemen Pembinaan Ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin NW Teliah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 125-132.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246.
- Kadarisman, M. (2018). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 300-306.
- Karno, D., & Riharjo, I. B. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).
- Lutfillah, N. Q., & Putri, B. L. A. (2024). Tantangan dalam Perancangan dan Implementasi Aplikasi Laporan Keuangan untuk UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 31(1).
- Mahendra, R. A., & Wahyono, A. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Manik, L. F., & Sari, E. N. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada SMA Swasta Bagian Medan Utara. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 19–29.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100-109.

- Mubarokah, F. A., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Ketepatan Sasaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(6).
- Mubarok, R. Z., Rahmawati, T., Wulandari, H. K., & Riono, S. B. (2021). Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 3(2), 45-55.
- Mubarok, D. A., & Usman, F. (2024). Determinan Kualitas Hasil Pengawasan Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. *Jurnalku*, 4(2), 193-209.
- Muslih, M., & Pratama, M. D. (2022). Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital dan Kewirausahaan*, 1(1), 16-28.
- Nini, K., Anis, F., & Hasiatul, A. (2022). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik Pada Pegawai Yang Bekerja Pada Kantor Inspektorat Baturaja (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
- Prawirosentono, Suyadi, (2008). Kebijakan Kinerja Karyawan, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPF.
- Permata, N., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 7(2), 105-117.
- Putra, P. A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Empiris pada Organisasi Pera. *Juhanperak*, 2(3), 474-492.
- Purba, M. A. (2018). Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan pada bank bri syariah kc pematangsiantar (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).
- Rahmawati, W. R. (2022, January). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. In Bandung Conference Series: Accountancy (Vol. 2, No. 1, pp. 51-58).
- Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota

- Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 6(2), 126-135.
- Rismawati, S. E., & Mattalata, S. E. (2018). *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Rorong, M. (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Politico*, 9(1).
- Rudi, A., & Haryanto, H. (2013). *Pengaruh Kompetisi Pengadaan Publik Terhadap Belanja Pemerintah (Studi Empiris pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Sawyer, D. S. C. (2005). *Internal Auditing, Buku Satu, Edisi Kelima*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sanjaya, K. S., & Faisal, A. (2022). Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Independensi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1825-1836.
- Setiadi, S. (2021). Implementasi Isak 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(2).
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD (Studi persepsi pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 89-101.
- Sumarni, S., Sjarlis, S., & Oktaviani, A. R. (2023). Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating Pada Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. *Cendekia Akademika Indonesia (CAI)*, 2(2), 225-239.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Suryani dan Hendrayadi, (2015). *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tadjudinsyah, M. A., & Fitria, A. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(2).
- Wathon, A. (2020). Efektifitas Administrasi Lembaga Melalui Aplikasi Excel. *Sistim Informasi Manajemen*, 3(2), 1-18.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1-20.
- Yahya, Y. (2016). Pengantar Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 12, Nomor 2, Februari 2023.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2021). *Sistem informasi akuntansi*. UGM Press.